

ANALISIS EFEKTIFITAS PENGEMBALIAN
DANA PINJAMAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM
PEREMPUAN (SPP) DALAM PROGRAM PNPM-
MP DI KECAMATAN ARGAMAKMUR



SKRIPSI

Oleh
JULIUS SIREGAR
NPM : C1A009037

UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
2014

ANALISIS EFEKTIFITAS PENGEMBALIAN
DANA PINJAMAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM
PEREMPUAN (SPP) DALAM PROGRAM PNPM-
MP DI KECAMATAN ARGAMAKMUR



SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Bengkulu
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana

Oleh
JULIUS SIREGAR
NPM : C1A009037

UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
2014

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang*

meminta, menerima dan setiap orang yang mencari,

mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya

pintu dibukakan. (Alkitab)

- *Mengetahui kekurangan diri adalah tangga untuk*

mencapai cita-cita. Berusaha terus untuk mengisi

kekurangan adalah keberanian yang luar biasa.

(Hamka)

- *Pendidikan seseorang tidak akan pernah sempurna*

sampai ia mati. (Robert Lee)



PERSEMBAHAN
Skripsi ini ku persembahkan kepada

- **Kedua Orang Tua ku (Alm.**

Edison Siregar & Asima

Siahaan)

- **Saudaraku (Yesica, Daniel, &**

Yabes)

- **Kekasihku (Ide Patiara Haloho)**

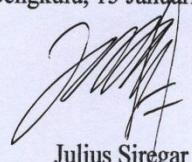
• Almamaterku

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhannya atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pikiran penulisan lain, yang saya akui sebagai bagian tulisan saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan kepada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak sengaja, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan Universitas batas saya terima.

Bengkulu, 15 Januari 2014



Julius Siregar

ABSTRACT

ANALYZE EFFECTIVE REPAYMENT OF FUNDS WOMAN'S SAVING LOAN GROUP (SPP) PNPM-MP PROGRAM IN ARGAMAKMUR DISTRICT

**Julius Siregar¹
Roosemarina A. Rambe²**

The objective of this study is to analyze effective repayment of funds Woman's Saving Loan group (SPP) , as well as characteristic the effective and ineffective Woman's Saving Loan groups (SPP) in Argamakmur District. This study used a sample Consisting of 32 members of Woman's Saving Loan groups (SPP) . Analysis tool used is descriptive analysis . The result show the loan repayment rate in the District Argamakmur Woman's Saving Loan groups (SPP) funds in 2010 and 2011 less than 60 % , shall mean the rate of return is less , starting in 2012 in the rate of return " good " which reached 80 % success lebih. Characteristic the effective SPP is a loan fund used as venture capital , business carried on that type of trade , Members have business experience , has the support of her husband , spirit respondents culture to work . Characteristic the ineffective SPP is Loans SPP is not used as working capital , is the type of business carried on farming , Members have experience of a business , there is no support from the husband , not the spirit of respondents culture to work.

Keyword : *woman loan Group (SPP), effective.*

¹ Student of faculty of economic and business, university Bengkulu

² Skripsi Supervisor

RINGKASAN

ANALISIS EFEKTIFITAS PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DALAM PROGRAM PNPM-MP DI KECAMATAN ARGAMAKMUR

Julius Siregar¹
Roosemarina A. Rambe²

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan dalam bentuk dana simpan pinjam, bagi mereka yang telah mempunyai usaha di Kecamatan Argamakmur yang dimulai sejak tahun 2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengembalian dana pinjaman SPP, mengetahui klasifikasi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang efektif dan yang tidak efektif dalam mengembalikan pinjaman dana SPP di Kecamatan Argamakmur. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis Deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengembalian pinjaman dana SPP di Kecamatan Argamakmur pada tahun 2010 25% yang menandakan efektifitas “kurang”, tahun 2011 tingkat pengembalian dana pinjaman 43,75% yang menandakan efektifitas “kurang”, tingkat pengembalian mulai tahun 2012 tingkat pengembalian “Baik” yakni mencapai 80% lebih. klasifikasi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang efektif yaitu jenis usaha dagang, penggunaan dana SPP untuk modal usaha, memiliki pengalaman usaha, budaya responden mengenai semangat kerja, adanya dukungan suami. Sedangkan klasifikasi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang tidak efektif yaitu jenis usaha pertanian, penggunaan dana SPP untuk kebutuhan sehari - hari, tidak memiliki pengalaman usaha, budaya responden tidak adanya semangat untuk bekerja, tidak adanya dukungan suami. Berdasarkan hal tersebut maka disarankan kepada PNPM memberikan pelatihan mengenai pengelolaan dana pinjaman yang bersifat usaha dagang khususnya terhadap kelompok SPP yang *kolektibilitas*, selain itu pihak UPK di Kecamatan Argamakmur harus melakukan tinjauan terhadap pengajuan pinjaman dana SPP, karena terdapat anggota yang tidak memiliki usaha sedangkan tujuan dari program SPP adalah untuk mempermudah akses permodalan bagi usaha mikro di pedesaan.

Kata Kunci :Efektifitas, Kolektibilitas, SPP.

- 1) Penulis
- 2) Pembimbing

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Skripsi berjudul “Analisis Efektifitas Pengembalian Dana Pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Dalam Program PNPM-MP Di Kecamatan Argamakmur “. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Bengkulu.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali arahan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menghaturkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Pembimbing skripsi saya Ibu Roosemarina A. Rambe SE.,MM dan selaku sekertaris jurusan yang dengan sabar dan teliti membimbing saya selama menulis skripsi saya. Terimakasih yang tak terhingga untuk bimbingan dan arahannya.
2. Bapak Benardin, SE.,MT dan Ibu Barika, SE., M.Si. selaku tim penguji skripsi yang bersedia memberikan masukan yang berguna.
3. Ibu Yusnida, SE.,Msi selaku ketua jurusan dan Ibu Roosemarina A. Rambe,SE.,MM selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
4. Mbak Nita yang telah banyak membantu melancarkan dan memberi semangat kepada penulis.
5. Orang tua tercinta yang telah memberikan bantuan moril maupun materi yang tak terhitung jumlahnya.
6. Para pegawai Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM di Kecamatan Argamakmur.
7. Ibu-ibu anggota SPP di Kecamatan Argamakmur yang telah memberikan andil terhadap penyelesaian skripsi
8. Teman-teman jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2009.

Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis

miliki. Maka dari itu penulis menerima kritik serta saran yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Bengkulu, 15 Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup penelitian	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori	9
2.1.1 Pengertian Pemberdayaan masyarakat	9
2.1.2 Pengertian kewirausahaan	17
2.2.3 Pengertian Modal.....	18
2.2.4 Simpan Pinjam Perempuan	21
2.1.5 Pinjaman Dana Bergulir	23
2.1.6 Pengertian Efektivitas	26
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Analisis.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Jenis dan Sumber Data	29
3.3 Definisi Operasional.....	29
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.5 Metode Pengambilan Sampel	30
3.6 Metode Analisis	31
3.6.1 Analisis Deskriptif.....	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	32
4.1.1	Deskripsi Data.....	32
4.1.2	Karakteristik Responden.....	33
4.1.3	Informasi Usaha	36
4.1.4.	formasi tentang SPP untuk Responden.....	41
4.1.5	Manfaat SPP.....	45
4.2.	Pembahasan	47

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	58
5.2	Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah kelompok SPP yang ada di Kecamatan Argamakmur 2010 -2013.....	4
1.2	Jumlah pinjaman kelompok SPP yang ada di Kecamatan Argamakmur 2010 -2013.....	5
1.3	Jumlah kelompok SPP yang mengalami kolektibilitas di Kecamatan Argamakmur 2010 -2013.....	6
4.1	Informasi Usaha Kelomok SPP Yang Efektif Dan Yang Tidak Efektif Berdasarkan Jenis Usaha.....	37
4.2	Informasi Usaha Kelomok SPP Yang Efektif Dan Yang Tidak Efektif Berdasarkan Pengalaman Usaha.....	39
4.3	Informasi Usaha Kelomok SPP Yang Efektif Dan Yang Tidak Efektif Berdasarkan Dukungan Suami.....	41
4.4	Info SPP Responden Berdasarkan Tahun Keanggotaan SPP.....	42
4.5	Info SPP Reponden berdasarkan Tahun Penerimaan dana SPP..	43
4.6	Info SPP Reponden berdasarkan Jumlah Dana yang diterima kelompok SPP.....	44
4.7	Info SPP Reponden berdasarkan Jumlah Dana yang diterima Anggota SPP.....	45
4.8	Manfaat SPP Kelomok SPP Yang Efektif Dan Yang Tidak Efektif Berdasarkan penggunaan dana SPP.....	47
4.9	informasi Kelomok SPP Yang Efektif Dan Yang Tidak Efektif Berdasarkan Kolektibilitas.....	49
4.10	Info Pinjaman Reponden berdasarkan Tingkat Pengembalian Pinjaman.....	49
4.11	Info Tentang pengembalian berdasarkan Asal.....	53
4.12	Informasi Kelomok Spp Yang Efektif Dan Yang Tidak Efektif Berdasarkan Persepsi Responden Tentang Pengembalian Dana SPP.....	54

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	34
4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	34
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Suami.....	35
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Suami.....	36
4.5	Informasi Usaha Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	37
4.6	Informasi Usaha Responden Berdasarkan Mulai Usaha.....	38
4.7	Informasi Usaha Responden Berdasarkan Pendapatan Usaha...	38
4.8	Informasi Usaha Responden Berdasarkan Pengalaman Usaha...	39
4.9	Informasi Usaha Responden Berdasarkan Kontribusi SPP dalam Permodalan.....	40
4.10	Dukungan suami terhadap usaha respondenDukungan suami terhadap usaha responden.....	46
4.11	Manfaat SPP Responden Berdasarkan penggunaan dana SPP...	47
4.12	Sistem yang diberikan PNPM Berdasarkan Pelatihan dari PNPM.....	48
4.13	Kolektibilitas Responden.....	48
4.14	Sistem yang diberikan PNPM Berdasarkan Berdasarkan Sanksi dari UPK.....	50
4.15	Sistem yang diberikan PNPM Berdasarkan waktu Pengembalian.....	51
5.16	Sistem yang diberikan PNPM Berdasarkan Sistem Pengembalian.....	52
4.17	Budaya Responden berdasarkan Asal.....	52
4.18	Budaya Responden Pepatah Bengkulu.....	53
4.19	Efektivitas Pengembalian Kelompok SPP di Kecamatan Argamakmur.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kuisisioner	62
2.	Frequency Table.....	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran, kemiskinan merupakan suatu masalah fenomenal sepanjang sejarah Negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan. Tidak ada persoalan yang lebih besar selain persoalan kemiskinan, persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja pedesaan hal tersebut disebabkan oleh Sumber daya manusia yang lemah.

Menurut Mulyadi (2003: 2) ada empat kebijaksanaan pokok dalam upaya peningkatan Sumber daya manusia (SDM), yaitu: (1) Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani, rohani dan kejuangan, maupun kualitas kehidupan seperti perumahan dan pemukiman yang sehat; (2) Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebaranya; (3) Peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan; serta (4) Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan prangkat hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM.

Upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan dan pengangguran harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Hingga saat ini bangsa Indonesia juga belum benar-benar terlepas dari kemiskinan sejak krisis berkepanjangan. Disamping itu, terlepas dari kemiskinan merupakan bagaikan mimpi surga, karena kemiskinan tidak dapat dihilangkan, namun hanya dapat dikurangi.

Tahun 2007 pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan tata kelola pemerintah daerah melalui pemberian Sumberdaya investasi untuk mendukung usulan-usulan produktif yang dikembangkan oleh masyarakat, dengan menggunakan proses perencanaan partisipatif yang menekankan pemberdayaan masyarakat. Program ini dikembangkan berdasarkan dua program pengembangan masyarakat sebelumnya, yaitu Program

Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), yang memfasilitasi pengawasan perencanaan masyarakat dan pengambilan keputusan terhadap dana hibah (*block grant*) yang dialokasikan bagi pendanaan kebutuhan prioritas mereka. Dari tahun 2007–2009, PNPM–Mandiri memperluas cakupannya kesemua kecamatan perdesaan dan perkotaan di Indonesia.

Pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam upaya mengurangi kemiskinan telah diakui oleh pemerintah dengan memasukkan program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat sebagai salah satu dari tiga kelompok utama program penanggulangan kemiskinan (Peraturan Presiden No. 13/2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan). Berdasarkan pengelompokan ini, PNPM–Mandiri ditunjuk sebagai program payung yang ditetapkan untuk mensinergikan dan menyelaraskan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat di Indonesia (Pedoman Umum PNPM–Mandiri).

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian yaitu mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi Sumber daya yang ada di lingkungannya, serta mengelola Sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, khususnya masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, pelembagaan sistem, sistem pembangunan partisipatif, pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat dan pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Sumber dana pelaksanaan PNPM Mandiri berasal dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD Kabupaten/Kota sebagai dana pendamping, Kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), Swadaya masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan individu/kelompok peduli lainnya).

Sumber-sumber dana bagi pelaksanaan PNPM Mandiri tersebut di atas digunakan untuk keperluan komponen-komponen program yaitu: (a) Pengembangan Masyarakat; (b) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); (c) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal; (d) Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program. Pada tahun 2009, lokasi sasaran PNPM Mandiri perdesaan meliputi seluruh Kecamatan perdesaan di indonesia yang dalam pelaksanaanya dilakukan secara bertahap. Kelompok sasaran PNPM adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan, kelembagaan masyarakat di perdesaan, kelembagaan pemerintah lokal.

Salah satu program PNPM Mandiri Perdesaan yaitu program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan dalam bentuk dana simpan pinjam, bagi mereka yang telah mempunyai usaha. Secara umum kegiatan SPP ini bertujuan untuk mengembangkan potensi usaha masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) khususnya perempuan.

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan Rumah Tangga Miskin (RTM).

Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu sasaran dari program PNPM Mandiri Perdesaan, Kecamatan Argamakmur merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Bengkulu Utara dan merupakan kecamatan yang mempunyai banyak penduduk pendatang yang datang dengan harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Argamakmur sudah berjalan sekitar kurang lebih 4 tahun yang dimulai pada tahun 2010.

Tabel 1.1 Jumlah Kelompok SPP yang Ada di Kecamatan Argamakmur
2010 -2013

No	Desa	Jumlah kelompok SPP			
		2010	2011	2012	2013
1	Karang Anyar II	1	-	5	5
2	Pematang Sapang	1	-	-	-
3	Karang Suci	1	-	8	7
4	Karang Anyar I	-	4	4	3
5	Gunung Selan	-	1	2	1
6	Gunung Agung	-	1	4	2
7	Sumber Agung	-	3	4	3
8	Sidodadi	-	1	3	-
9	Kemumu	-	-	7	7
10	Sidourip	-	-	2	-
11	Datar Ruyung	-	-	4	1
13	Purwodadi	-	-	2	3
14	Tebing Kuning	-	-	1	-
15	Gunung Alam	-	-	-	3
16	Kuro Tidur	-	-	-	3
Jumlah		3	10	44	38

Sumber UPK PNPM Kecamatan Argamakmur

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kelompok SPP pada tahun 2010 berjumlah 3 kelompok, tahun 2011 berjumlah 10 kelompok, tahun 2012 berjumlah 44 kelompok dan tahun 2013 berjumlah 38 kelompok. Berdasarkan data tersebut selama empat tahun dari tahun 2010 s.d. 2013 jumlah kelompok SPP di Kecamatan Argamakmur mengalami peningkatan dari tahun 2010 s.d. 2012 dan mengalami penurunan pada tahun 2013. Walaupun mengalami penurunan jumlah kelompok tahun 2013 namun penurunan jumlah kelompok tidak berimbang pada jumlah pinjaman kelompok, justru jumlah pinjaman tahun 2013 lebih besar dibanding tahun 2012 seperti yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Pinjaman Kelompok SPP yang Ada di Kecamatan Argamakmur
2010 -2013

No	Desa	Jumlah Pinjaman Desa			
		2010	2011	2012	2013
1	Karang Anyar II	Rp. 14.250.000	-	Rp. 170.000.000	Rp. 230.000.000
2	Pematang Sapang	Rp. 9.500.000	-	-	-
3	Karang Suci	Rp. 20.000.000	-	Rp. 340.000.000	Rp. 369.000.000
4	Karang Anyar 1	-	Rp. 79.000.000	Rp. 190.000.000	Rp. 145.000.000

5	Gunung Selan	-	Rp. 30.000.000	Rp. 79.000.000	Rp. 38.000.000
6	Gunung Agung	-	Rp. 30.000.000	Rp. 117.000.000	Rp. 60.000.000
7	Sumber Agung	-	Rp. 70.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 150.000.000
8	Sidodadi	-	Rp. 39.340.000	Rp. 166.500.000	Rp. 80.000.000
9	Kemumu	-	-	Rp. 320.000.000	Rp. 470.000.000
10	Sidourip	-	-	Rp. 60.000.000	-
11	Datar Ruyung	-	-	Rp. 175.000.000	Rp. 60.000.000
13	Purwodadi	-	-	Rp. 42.750.000	Rp. 130.000.000
14	Tebing Kuning	-	-	Rp. 23.750.000	-
15	Gunung Alam	-	-	-	Rp. 72.000.000
16	Kuro Tidur	-	-	-	Rp. 60.000.000
Jumlah		Rp. 43.750.000	Rp. 248.340.000	Rp. 1.713.000.000	Rp. 1.864.000.000

Sumber UPK PNPM Kecamatan Argamakmur

Berdasarkan data tersebut dijelaskan bahwa jumlah pinjaman kelompok mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2010 jumlah pinjaman kelompok SPP di Kecamatan Argamakmur Rp 43.750.000, tahun 2011 Rp 248.340.000, tahun 2012 Rp 1.713.000.000, dan tahun 2013 Rp 1.864.000.000.

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Argamakmur melalui Program PNPM Mandiri Perdesaan telah membantu masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam meningkatkan kesejahteraan. Melalui dana bergulir yang dipinjamkan kepada masyarakat, mereka dapat menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha dengan cicilan bunga yang sangat ringan.

Namun ada pula kelompok SPP yang mengalami *kolektibilitas* dalam pengembalian dana pinjaman, berikut data jumlah kelompok SPP yang yang mengalami *kolektibilitas*.

Tabel 1.3 Jumlah Kelompok SPP yang Mengalami Kolektibilitas di Kecamatan Argamakmur 2010 -2013

No	Desa	Jumlah kelompok SPP			
		2010	2011	2012	2013
1	Karang Anyar II	1	0	-	-
2	Pematang Sapang	1	0	0	0
4	Karang Anyar I	0	1	1	1
5	Gunung Selan	0	1	-	-
6	Gunung Agung	0	1	-	-
7	Sumber Agung	0	-	1	1
8	Sidodadi	0	-	2	-

9	Sidourip	0	0	1	0
10	Datar Ruyung	0	0	1	-
11	Tebing Kuning	0	0	1	0
<i>Jumlah</i>		2	3	7	2

Sumber: UPK PNPM Kecamatan Argamakmur

Berdasarkan data tersebut dijelaskan bahwa jumlah kelompok SPP yang mengalami *kolektibilitas* 2 kelompok pada tahun 2010, 3 kelompok tahun 2011, 8 kelompok tahun 2012, 2 kelompok 2013, 0 berarti tidak melakukan pinjaman pada tahun tersebut. Dalam pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Argamakmur sangat membantu masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, melalui bantuan dana bergulir SPP tiap anggota dapat menggunakan dana pinjaman tersebut untuk modal usaha mereka. Banyak kelompok SPP yang telah berkembang dan mengajukan pinjaman lebih besar dari yang sebelumnya, namun ada pula beberapa kelompok yang *kolektibilitas* dalam pengembalian pinjamannya, sehingga diperiode berikutnya kelompok tersebut akan susah untuk mendapatkan pinjaman, terutama untuk pinjaman yang bersekala besar. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul “Analisis Efektifitas Pengembalian Dana Pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Program PNPM-MP di Kecamatan Argamakmur”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian mengenai efektivitas kegiatan pengembalian dana pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Argamakmur dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pengembalian dana pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Argamakmur?
2. Bagaimana klasifikasi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang efektif dan yang tidak efektif dalam mengembalikan pinjaman dana SPP di Kecamatan Argamakmur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis efektifitas pengembalian dana pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Argamakmur.
2. Mengetahui klasifikasi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang efektif dan yang tidak efektif dalam mengembalikan pinjaman dana SPP di Kecamatan Argamakmur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada penentu kebijakan, khususnya pemerintah di daerah setempat untuk menentukan kebijakan yang sesuai dalam merumuskan program-program untuk mengentaskan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk.
2. Dari sudut pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama secara akademis khususnya tentang pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai suatu program pengentasan kemiskinan dan dapat menjadi informasi bagi kepentingan studi dimasa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini mencapai tujuan yang diharapkan dan tetap terfokus pada permasalahan penelitian, maka penelitian ini hanya dibatasi pada kajian mengenai kelompok SPP di Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara. Fokus penelitian pada efektivitas pengembalian dana pinjaman program SPP di Kecamatan Argamakmur. Efektivitas dalam penelitian ini mengacu pada ketercapaian target pengembalian pinjaman sesuai yang telah ditetapkan oleh (Unit Pelaksana Kegiatan) UPK di Kecamatan Argamakmur.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah membantu komunitas dengan Sumber daya, kesempatan, keahlian, dan pengetahuan agar kapasitas komunitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga komunitas Tim Koordinasi PNPM (2008). Sulistiyan (2004:7) menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Menurut Suharto (2005: 38) pemberdayaan adalah sebuah tujuan dan proses. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Suharto (2005: 38) pengertian pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan menurut berbagai ahli, yaitu:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah dan tidak beruntung (Ife, 1995).
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengotrolan atas, dan mempengaruhi

terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (Persons, *et al.*, 1994).

3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkauasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Suharto (2005: 40) menyatakan bahwa prinsip pemberdayaan masyarakat menurut perspektif pekerjaan sosial, sebagai berikut:

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau Sumber-Sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
5. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan Sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap Sumber-Sumber dan kemampuan untuk menggunakan Sumber-Sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif: permasalahan selalu memiliki beragam solusi.

11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Dalam penelitian ini yang dimaksud pemberdayaan adalah pemberdayaan yang dilakukan terhadap kelompok simpan pinjam perempuan dalam mengelola dana pinjaman di Kecamatan Argamakmur.

2.1.1.2 Pemberdayaan Perempuan

Dalam hal peningkatan ekonomi perempuan di Indonesia khususnya di daerah perdesaan, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja, dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga. Selain itu perempuan juga dihadapkan pada kendala tertentu yang dikenal dengan istilah “*tripple burden of women*”, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas.

Oleh karena itu program pemberdayaan bagi perempuan dibidang ekonomi sangat diperlukan karena pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian terutama dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. Menurut Suharto (2005: 47) tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah:

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembagunan seperti yang terjadi selama ini.
2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

2.1.1.3 Gambaran PNPM Mandiri Perdesaan

Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri pada hakikatnya adalah program nasional yang dijalankan oleh semua kalangan untuk menanggulagi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian dalam tujuan peningkatan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Program ini terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat (Tim Koordinasi PNPM, 2008).

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan (Tim Koordinasi PNPM, 2008) adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, sedangkan tujuan khususnya meliputi:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.

2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan Sumber daya lokal.
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
4. Menyediakan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan; (2) Kelembagaan masyarakat di perdesaan; (3) Kelembagaan pemerintahan lokal. Pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada tingkat desa (Tim Koordinasi PNPM, 2008) meliputi:

1. Kepala Desa (Kades)

Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di desa. Bersama Badan Permusyawarahan Desa (BPD), Kepala Desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala Desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau badan kerja sama antar desa.

2. Badan Permusyawarahan Desa (BPD atau sebutan lainnya)

Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, BPD (atau sebutan lainnya) berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk

sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan di desa. BPD juga bertugas mewakili masyarakat bersama Kepala Desa dalam membuat persetujuan pembentukan badan kerja sama antar desa.

3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris.

4. Tim Penulis Usulan (TPU)

Tim Penulis Usulan (TPU) berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Peran Tim Penulis Usulan adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes). Anggota TPU dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TPU bekerja sama dengan kader-kader desa yang ada.

5. Tim Pemantau

Tim Pemantau menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah anggota tim pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil pemantauan kegiatan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa (jika diperlukan).

6. Tim Pemelihara

Tim Pemelihara berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah anggota tim pemelihara sesuai dengan kebutuhan dan

kesepakatan saat musyawarah. Hasil laporan pemeliharaan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa (jika diperlukan). Dalam menjalankan fungsinya, tim pemelihara didukung dengan dana yang telah dikumpulkan atau yang berasal dari swadaya masyarakat setempat.

7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K)

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. Sebagai kader masyarakat berperan membantu pengelolaan pembangunan di desa, diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD/K disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan, kemampuan teknik, serta kualifikasi pendampingan kelompok ekonomi dan sebagainya. Namun jumlahnya sekurang-kurangnya dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan.

8. Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah kelompok masyarakat yang terlibat dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan. Termasuk sebagai kelompok masyarakat misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), kelompok usaha ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pengelola pasar desa, dan sebagainya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan.

Prinsip-prinsip itu (Tim Koordinasi PNPM, 2008) meliputi:

1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan

- yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata.
2. Otonomi. Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa intervensi negatif dari luar.
 3. Desentralisasi. Prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
 4. Berorientasi pada masyarakat miskin. Prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
 5. Partisipasi. Prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.
 6. Kesetaraan dan keadilan gender. Prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
 7. Demokratis. Prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
 8. Transparansi dan Akuntabel. Prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
 9. Prioritas. Prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.

10. Keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

2.1.2 Kewirausahaan

Menurut Soeharto Prawirokusumo (2010: 26), Kewirausahaan adalah segala sesuatu yang menyangkut penciptaan dan pembentukan suatu usaha yang berorientasi kepada pertumbuhan (dinamis) wirausaha berarti orang-orang yang menangkap suatu ide atau peluang dengan jalan mengorganisir Sumber daya dalam suatu usaha, menambah suatu nilai dalam usaha tersebut sehingga bermanfaat kepada pembangunan ekonomi suatu bangsa.

Menurut Suryana (2006: 2) wirausaha adalah usaha yang dilaksanakan dengan sifat-sifat kewiraan yaitu berani, percaya diri, siap menanggung resiko, dan berorientasi masa depan dengan memanfaatkan dan mengelola peluang usaha yang ada, dengan kata lain wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kewirausahaan atau kewiraswastaan seperti: keberanian mengambil resiko, keutamaan dan keteladanan dalam menangani usaha dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri.

Menurut Soeharto Prawirokusumo (2010: 26), ada sepuluh pedoman sebagai wirausaha: (1) Dibuat dengan tujuan usaha dan diupayakan untuk dicapai; (2) Kerja keras dan tidak patah semangat; (4) Fokus pada ceruk pasar; (5) Jangan berlarut-larut, dan laksanakan keputusan segera. Jangan suka menunda masalah, selesaikan segera; (6) Organisasi yang responsif terhadap *stakeholders*; (7) Mengelola CF (*cash flow*) dengan baik; (8) *Creative dan innovative*; (9) Minimalisasi lapisan manajemen; (10) Maksimalisasi profit; (11) Percaya kepada diri sendiri.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah semangat, kemampuan dan perilaku individu yang berani menanggung resiko, baik itu resiko finansial, psikologikal, maupun sosial dalam melakukan suatu proses penciptaan sesuatu yang baru (kreasi baru) dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (inovasi) dengan menerima hasil berupa imbalan moneter dan kepuasan pribadi.

2.1.3 Modal

Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Modal dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segalanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan, yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar (Widyaningrum, 2002: 49).

2.1.3.1 Macam-Macam Modal

1. Modal Sendiri

Menurut Kartasapoetra dkk (2005: 46) mengatakan bahwa modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain sebagainya. Kelebihan modal sendiri adalah:

1. Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban perusahaan.
2. Tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal.
3. Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama.
4. Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.

Kekurangan modal sendiri adalah:

1. Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas.

2. Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya.
3. Kurang motivasi pemilik, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.

2. Modal Asing (Pinjaman)

Menurut Menurut Kartasapoetra dkk (2005: 46) asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh.

Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari:

1. Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta maupun pemerintah atau perbankan asing.
2. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, modal ventura, asuransi leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya.
3. Pinjaman dari perusahaan non keuangan.

Kelebihan modal pinjaman adalah:

1. Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Selamadana yang diajukan perusahaan layak, perolehan dana tidak terlalu sulit. Banyak pihak berusaha menawarkan dananya ke perusahaan yang dinilai memiliki prospek cerah.
2. Motivasi usaha tinggi. Hal ini merupakan kebalikan dari menggunakan modal sendiri. Jika menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi, ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan juga berusaha menjaga image dan kepercayaan perusahaan yang memberi pinjaman agar tidak tercemar.

Kekurangan modal pinjaman adalah:

1. Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain sudah pasti disertai berbagai kewajiban untuk membayar jasa seperti: bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, materai dan asuransi.
 2. Harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang mengalami likuiditas merupakan beban yang harus ditanggung.
 3. Beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar.
3. Modal Patungan

Selain modal sendiri atau pinjaman, juga bisa menggunakan modal usaha dengan cara berbagai kepemilikan usaha dengan orang lain. Caranya dengan menggabungkan antara modal sendiri dengan modal satu orang teman atau beberapa orang (yang berperan sebagai mitra usaha). Menurut Kartasapoetra dkk (2005 : 47).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa modal usaha adalah harta yang dimiliki untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh laba yang optimal sehingga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di Kecamatan Argamakmur.

2.1.4 Simpan Pinjam Perempuan

Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan penyaluran dana pinjaman bergulir bagi kelompok perempuan dalam skala mikro (*mikro finance*). Dana yang dialokasikan untuk kegiatan SPP yaitu 25 persen dari total dana Bantuan Langsung Tunai (BLM) per kecamatan.

Secara umum kegiatan SPP bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan

kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja.

Adapun Tujuan khusus kegiatan SPP (Tim Koordinasi PNPM, 2010):

1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha/sosial dasar.
2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam kaum perempuan. Sasaran kegiatan SPP yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha/kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada dimasyarakat. Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

Kriteria kelompok perempuan yang mendapat pinjaman dana yaitu:

1. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, satu sama lain mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
3. Mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai Sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
4. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

Melalui pinjaman dana bergulir, masyarakat dapat meminjam dana yang akan digunakan sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya, namun harus dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan target pengembalian pinjaman yang telah ditetapkan.

Partisipasi Perempuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan yaitu: (1) Ikut serta dalam musyawarah yang diselenggarakan di tingkat desa maupun antar desa; (2) Ikut serta dalam musyawarah khusus perempuan yang diselenggarakan ditingkat desa untuk membahas gagasan-gagasan yang berasal dari kelompok perempuan.

Tahapan seleksi di tingkat desa untuk memilih kelompok SPP (Tim Koordinasi PNPM 2010):

1. Tahapan Seleksi Penentuan usulan desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP.
2. Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa.
3. Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan.

Sedangkan, syarat penulisan usulan SPP (Tim Koordinasi PNPM 2010) harus memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi kelompok SPP.
2. Gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang, dan perhitungan rencana kebutuhan dana.
3. Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin.

Kelompok wanita harus mengajukan proposal yang ditetapkan melalui jalur Musyawarah Khusus untuk Perempuan (MKP). Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam perjanjian pinjaman (Tim Koordinasi PNPM 2010) yang mencakup hal-hal:

1. Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan: besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing. Sistem perhitungan pinjaman menurun atau tetap.
2. Jangka waktu pinjaman Sumber dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maksimal 12 bulan.
3. Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur tiga kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperlihatkan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok.
4. Angsuran langsung dari kelompok ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

2.1.5 Pinjaman Dana Bergulir

2.1.5.1 Pengertian Pinjaman Dana Bergulir

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya Suharto, (2005: 12). Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan Pinjaman Bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana BKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pedoman ini hanya mengatur ketentuan pokok untuk pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir, namun keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat setempat.

Secara umum Pinjaman bergulir adalah pinjaman dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang diberikan kepada masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Tim Koordinasi PNPM, 2010). Beberapa pertimbangan PNPM Mandiri Perdesaan menggunakan kegiatan pinjaman bergulir:

(1) Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan telah terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tangga miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kekayaannya; (2) Akses rumah tangga miskin kejasa layanan keuangan formal masih sangat rendah, sekitar 29 juta rumah tangga miskin masih belum mendapatkan akses ke lembaga keuangan; (3) Pinjaman bergulir PNPM Mandiri perkotaan memiliki peluang dapat menjangkau sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin yang sama sekali belum menerima akses ke lembaga keuangan formal; (4) Permintaan pinjaman dana bergulir pada rencana pronangkis masyarakat masih tinggi; (5) Pemutusan pendampingan yang telah berjalan selama ini bila tanpa disertai kinerja yang memadai akan merusak budaya meminjam dan jaminan sosial yang ada di masyarakat (Tim Koordinasi PNPM, 2010).

Pinjaman dana bergulir berasal dari modal stimulan dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang disalurkan melalui UPK (Unit Pengelola Keuangan) kepada masyarakat miskin di kelurahan/desa sebagai salah satu program yang disediakan oleh PNPM Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pinjaman dana bergulir adalah merupakan salah satu pilihan masyarakat

dari berbagai alternatif kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Memperhatikan dari hal tersebut di atas, maka pembuatan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana pinjaman bergulir di samping harus memenuhi beberapa asas. Asas tersebut yaitu (Tim Koordinasi PNPM 2010):

1. Asas Kesetiakawanan

Mengandung maksud bahwa program dana pinjaman bergulir harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang, usaha kecil, menengah, koperasi, yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

2. Asas Keadilan

Mengandung maksud bahwa dalam penyelenggaraan dana pinjaman bergulir harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

3. Asas Kemanfaatan

Mengandung maksud bahwa dalam program dana pinjaman bergulir harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

3. Asas Kemitraan

Mengandung maksud dalam menyalurkan dana pinjaman bergulir diperlukan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial.

5. Asas Keterpaduan

Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

6. Asas Akuntabilitas

Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Asas Keterbukaan

Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan program dana pinjaman bergulir.

8. Asas Partisipasi

Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir adalah dalam setiap program dana pinjaman bergulir harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

9. Asas Profesional

Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir adalah dalam setiap program dana pinjaman bergulir kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

10. Asas Berkelanjutan

Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir adalah dalam program dana pinjaman bergulir dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan daripada pinjaman dana bergulir adalah untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Meskipun demikian, PNPM bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan. PNPM Mandiri Perdesaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK.

2.1.6 Pengertian Efektivitas

Suatu organisasi secara keseluruhannya dalam kaitannya dengan efektivitas adalah mencapai tujuan organisasi. Jika tiap-tiap individu berperilaku atau bekerja efektif dalam mencapai tujuannya, maka kelompok dimana ia menjadi anggota juga efektif dalam mencapai tujuan, organisasi itu juga efektif mencapai tujuan (Rivai, 2012). Efektivitas berbeda dengan efisiensi. Efisiensi adalah pengorbanan

untuk mencapai tujuan. Dimana semakin kecil pengorbanannya dalam mencapai tujuan, maka dikatakan semakin efisiensi. Sedangkan Efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (organisasi) dapat dicapai (Sigit, 2003: 1). Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasaan pengguna.

2.1.6.1 Kriteria Efektivitas Organisasi

Konsep mengenai efektivitas organisasi selain disandarkan pada teori sistem, tetapi perlu ditambahkan dengan sesuatu yang baru yaitu pada dimensi waktu. Hubungan antara kriteria efektivitas dan dimensi waktu menurut Rivai (2012: 106) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Produksi

Produksi menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan.

2. Efisiensi

Konsep efisiensi didefinisikan sebagai angka perbandingan antara output dan input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan, antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau output yang merupakan bentuk umum dari ukuran ini.

3. Kepuasan

Konsep kepuasan mendefenisikan penekanan pada perhatian yang menguntungkan bagi anggota organisasi maupun pelanggannya. Artinya bahwa organisasi harus mampu memberikan kepuasan kepada kebutuhan para anggota.

4. Adaptasi

Kemampuan beradaptasi diartikan dengan sampai seberapa organisasi mampu menanggapi perubahan intren dan ekstren. Jika organisasi tidak dapat menyesuaikan diri, maka kelangsungan hidupnya akan terancam, namun adaptasi tidak memiliki ukuran yang pasti dan nyata. Dapat dijelaskan, apabila tiba waktunya untuk mengadakan penyesuaian dikarenakan adanya fenomena-fenomena tertentu, maka organisasi harus dapat menyesuaikan diri.

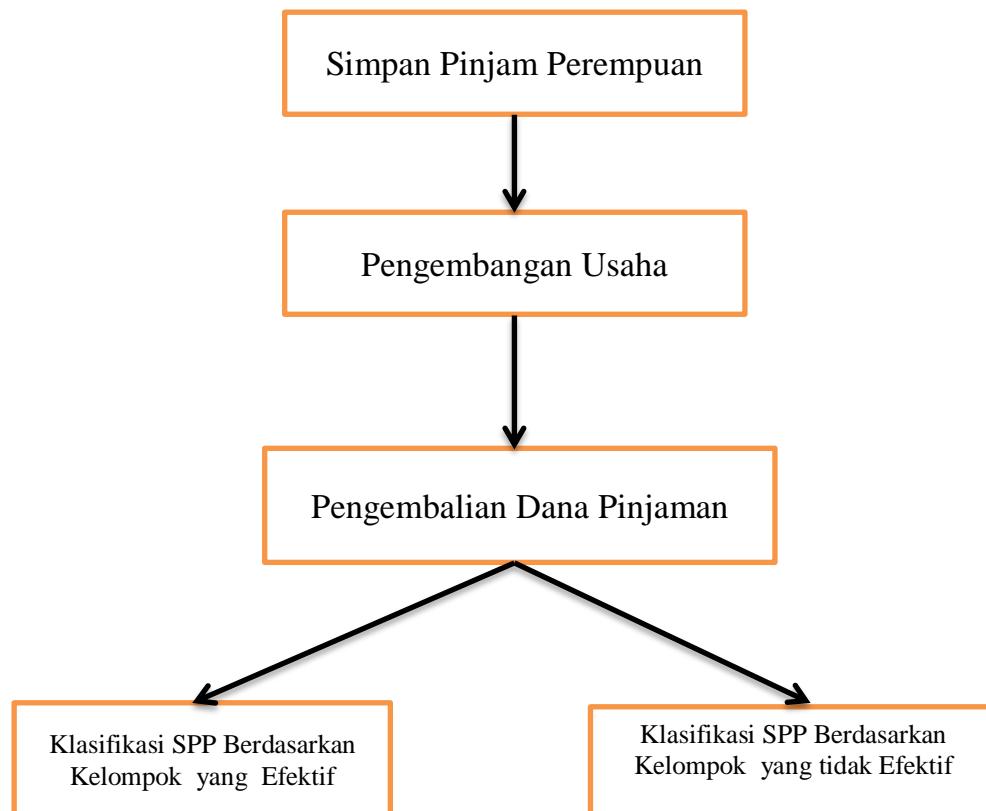
5. Perkembangan

Organisasi harus mengembangkan diri agar tetap hidup atau berjaya untuk jangka panjang. Efektivitas dengan pertimbangannya, maka efektivitas dapat dibagi menjadi efektivitas jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Keseimbangan optimal adalah keseimbangan dari pencapaian hubungan yang wajar antara kriteria-kriteria itu dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatgunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian mengenai efektivitas kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Yenita Syaiful (2010) dengan judul “Efektivitas dan Dampak Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Ekonomi Kerakyatan terhadap Koperasi Wanita di Kota Bengkulu” mengemukakan bahwa program perkuatan pinjaman dana bergulir berdampak pada peningkatan jumlah anggota dan peningkatan pendapatan koperasi (63,46%), cukup efektif dalam peningkatan omset usaha dan pengembalian pinjaman (64,96%), dan sangat tidak efektif dalam pegembalian pinjaman (33,33%).

2.3 Kerangka Analisis



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey yang bersifat pengumpulan fakta di lapangan untuk mengetahui efektifitas pengembalian dana SPP serta klasifikasi kelompok SPP yang efektif dan tidak efektif dalam pengembalian pinjaman dana, maka data yang digunakan adalah data kuantitatif yang merupakan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari Sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara yang dipandu dengan kuesioner dengan pertanyaan tertutup yang berisi informasi mengenai responden.

3.3 Definisi Oprasional

1. Program dana bergulir SPP kegiatan dari PNPM yang dilakukan dalam bentuk pinjaman modal dengan pola bergulir kepada kelompok SPP di Kecamatan Argamakmur dengan sistem yang telah ditetapkan oleh UPK.
2. Dana bergulir adalah seluruh dana program SPP dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat di Kecamatan Argamakmur.
3. Kolektibilitas adalah kondisi kelompok SPP yang tidak bisa mengembalikan pinjaman sesuai dengan target pengembalian yang telah ditetapkan oleh UPK.
4. Kelompok SPP dalam penelitian ini adalah kelompok perempuan dari rumah tangga miskin di Kecamatan Argamakmur.
5. Efektivitas adalah rasio tingkat pengembalian pinjaman SPP di Kecamatan Argamakmur dengan ukuran (Tim koordinasi PNPM, 2010). Ukuran hasil efektivitas peneliti merujuk pada standar petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri Pedesaan yakni:
 - a. Tingkat pengembalian mencapai diatas 80% = Baik.
 - b. Tingkat pengembalian mencapai antara 60% - 79.99% = Cukup.

- c. Tingkat pengembalian mencapai antara 40% - 59.99% = Kurang.
- 6. Klasifikasi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang efektif dan tidak efektif dalam mengembalikan pinjaman dana SPP, dalam penelitian ini peneliti melihat variabel apa saja yang menjadi pendukung keberhasilan kelompok SPP dalam menggunakan dana pinjaman bergulir dan realisasi pengembalian pinjamannya sesuai dengan target pengembalian pinjaman. Seperti kemampuan Sumber daya anggota, kondisi ekonomi wilayah usaha anggota, kondisi ekonomi pemimjam, kondisi kelompok SPP.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan data primer yaitu menggunakan metode wawancara dengan cara menemui secara langsung responden yang dipandu dengan koesioner 32 responden.

3.5 Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Argamakmur yang diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak dibandingkan kecamatan yang ada Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam penelitian ini sampel dipilih berdasarkan *purposive sampling*, yaitu empat kelompok SPP yang efektif dan empat kelompok SPP yang tidak efektif. Kelompok yang efektif yaitu: Desa Karang Suci, Karang Anyar II, Sumber Agung, Gunung Agung, dan empat kelompok SPP yang tidak efektif yaitu: Karang Anyar I, Sidourip, Sidodadi, Pematang Sapang. Pada setiap desa diambil sampel sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Desa Karang Suci | : 4 orang |
| 2. Desa Karang Anyar II | : 4 orang |
| 3. Desa Sumber Agung | : 4 orang |
| 4. Desa Gunung Agung | : 4 orang |
| 5. Desa Karang Anyar I | : 4 orang |
| 6. Desa Sidourip | : 4 orang |
| 7. Desa Sidodadi | : 4 orang |
| 8. Desa Pematang Sapang | : 4 orang |

————— +

32 orang

Sampel jumlahnya sama antara masing-masing desa karena dengan pertimbangan bahwa desa yang terpilih tersebut merupakan desa dengan kelompok yang efektif dan tidak efektif dalam pengembalian dana pinjaman SPP, sehingga ini dianggap cukup mewakili. Penentuan sampel diberikan kepada ketua kelompok, bendahara, sekretaris, dan satu anggota spp dari kelompok.

3.6 Metode Analisis

Metode Analisis didalam penelitian ini digunakan analisis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, hasil penelitian ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan tabulasi.